#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

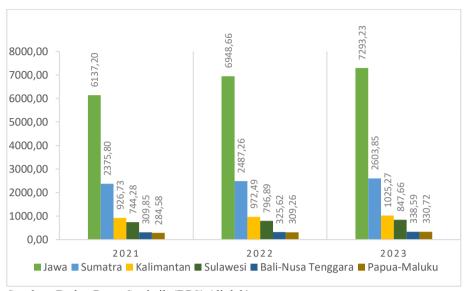
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu perekonomian, yang mana pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Perkembangan suatu wilayah dapat diukur dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Peningkatan PDB dan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Sutanto et al., 2025).

Menurut Sukirno (2016) dalam (Perdana et al., 2023) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang mengakibatkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat. Dari waktu ke waktu, kemampuan suatu negara atau daerah dalam menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat. Peningkatan kemampuan ini terjadi karena faktor-faktor produksi terus mengalami pertumbuhan baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Ekonom Robert Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan Solow-Swan (1956) dalam teori ekonomi neoklasik. Dalam model

tersebut, faktor produksi merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, yang terdiri dari modal, tenaga kerja, jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi (Sinaga et al., 2024). Dalam model Solow, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi oleh akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Sementara itu, kemajuan teknologi dianggap sebagai variabel eksogen yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi (Ayunani & Nuraini, 2025). Selain itu dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo terdapat empat komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Keempat faktor ini berperan dalam menentukan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pertumbuhannya dalam jangka panjang (Prastiwi et al., 2025).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perekonomian yang sangat beragam di setiap wilayahnya. Nilai Produk domestik regional bruto memberikan gambaran mengenai kapasitas wilayah tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Produk domestik regional bruto yang lebih tinggi biasanya menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar (Rosdiyanto & Sukartini, 2025). Untuk memahami perbandingan kondisi perekonomian antar wilayah di Indonesia, berikut adalah grafik nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di enam Pulau besar di Indonesia.

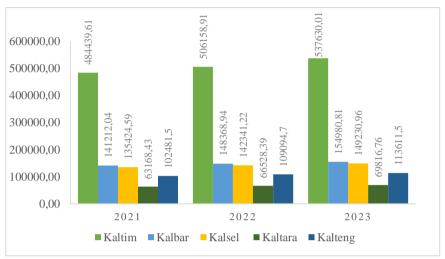


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Gambar 1. 1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Enam Pulau Besar di Indonesia Tahun 2021-2023 (Triliun)

Secara nasional, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Berdasarkan data pada gambar 1.1, terlihat bahwa PDRB Pulau Jawa memiliki nilai tertinggi dibandingkan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku selama periode 2021-2023. Namun, PDRB di luar Pulau Jawa, khususnya di Kalimantan, juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Sebagai salah satu pulau dengan potensi sumber daya alam yang besar, Kalimantan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama melalui sektor perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan. Oleh karena itu, perkembangan dan kondisi perekonomian di Pulau Kalimantan menarik untuk dikaji mengingat Pulau Kalimantan sendiri memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional sehingga menjadikan kajian mengenai PDRB di Pulau Kalimantan semakin relevan dan menarik untuk

diteliti. Berikut adalah grafik perkembangan produk domestik regional bruto di setiap Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 2 Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Lima Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2021-2023 (Miliar)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) di lima Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Dimana Kalimantan Timur mendominasi dengan PDRB sebesar 484.439,61 miliar rupiah dan terus menunjukkan tren peningkatan, mencapai 506.158,91 miliar rupiah pada 2022 serta 537.630,01 miliar rupiah pada 2023. Sementara itu, Kalimantan Barat sebesar 141.212,04 miliar rupiah pada 2021, kemudian tumbuh menjadi 143.868,94 miliar rupiah di 2022 dan mencapai 154.980,81 miliar rupiah di 2023. Di provinsi Kalimantan Selatan sendiri, nilai PDRB tercatat 135.425,99 miliar rupiah pada 2021, meningkat menjadi 142.341,22 miliar rupiah pada 2022, dan mencapai 149.230,96 miliar rupiah pada 2023. Sedangkan Kalimantan Tengah menunjukkan pertumbuhan dari 102.481,5 miliar rupiah pada 2021 menjadi 113.611,5 miliar rupiah pada 2023. Di sisi lain,

Kalimantan Utara memiliki nilai terendah, dengan angka 63.156,43 miliar rupiah pada 2021 yang naik menjadi 69.816,76 miliar rupiah pada 2023. Pertumbuhan yang positif tersebut karena Pulau Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan. Sumber daya alam ini memberikan peran penting dalam mendongkrak perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah yang baik menjadi salah satu faktor pertumbuhan tersebut (Sari et al., 2025).

Namun, fenomena yang terjadi pada perekonomian di Pulau Kalimantan adalah ketidakmerataan PDRB di lima Provinsi tersebut. Kalimantan Timur memiliki PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Ketimpangan tersebut bisa terjadi karena salah satunya disebabkan oleh dominasi sektor ekstraktif di Kalimantan Timur, termasuk pertambangan minyak, gas, dan batu bara, yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, provinsi lainnya, meskipun memiliki potensi ekonomi yang signifikan, masih tertinggal dalam hal kontribusi Produk Domestik Regional Bruto.

Meskipun Kalimantan Timur mendominasi, potensi ekonomi provinsi lainnya juga tidak kalah strategis, Kalimantan Barat, misalnya, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertanian sebagai penopang utama. Kalimantan Selatan juga memiliki keunggulan pada sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sementara itu, Kalimantan Tengah menunjukkan

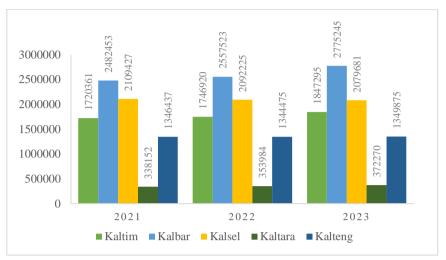
pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dengan bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit, kehutanan, serta pertanian, yang berpotensi terus dikembangkan menjadi sektor unggulan. Di sisi lain, Kalimantan Utara sebagai provinsi yang relatif baru, meskipun mencatatkan nilai PDRB terendah, tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pengembangan kawasan industri serta pemanfaatan potensi sumber daya alam dan posisi strategisnya dekat perbatasan internasional merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi provinsi ini ke depan. Meskipun, potensi di setiap provinsi strategis ketidakmerataan ini menjadi perhatian penting dalam upaya untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Kalimantan.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu faktor nilai PDRB yang tinggi. Pembangunan IKN berpotensi menciptakan berbagai peluang pengembangan infrastruktur, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat yang akan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Selain pembangunan fisik, pengembangan IKN juga mencakup fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah merencanakan pembangunan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat kesehatan di kawasan sekitar IKN (Rahmalia & Sari, 2024). Proyek tersebut diperkirakan akan meningkatkan Belanja Modal dan menciptakan lapangan kerja baru, yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan PDRB. Namun, dampak dari kebijakan tersebut pada provinsi-provinsi lainnya masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Kalimantan Timur tetapi

juga membawa manfaat bagi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Seiring dengan peningkatan PDRB di lima provinsi Kalimantan, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif. Dalam konteks ini, Tenaga Kerja memegang peran penting sebagai penggerak utama produktivitas dan output ekonomi. Sementara itu, Belanja Modal meliputi alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan aset daerah menjadi pendorong bagi iklim investasi serta efisiensi kegiatan ekonomi. Di sisi lain, Luas Lahan Kelapa Sawit berkontribusi besar pada perekonomian dan sebagai salah satu sektor strategis di Kalimantan. Perluasan dan pengelolaan lahan kelapa sawit yang optimal dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong nilai tambah yang berdampak positif pada Produk Domestik Regional Bruto.

Untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi PDRB, Tenaga Kerja menjadi salah satu variabel penting yang berperan dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Berikut ini disajikan gambaran mengenai perkembangan Tenaga Kerja di lima provinsi di Pulau Kalimantan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

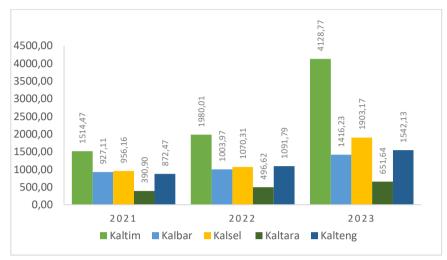
Gambar 1. 3 Jumlah Tenaga Kerja di Lima Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2021-2023 (jiwa)

Berdasarkan gambar 1.3 jumlah tenaga kerja di lima Provinsi di Pulau Kalimantan menunjukkan jumlah tenaga kerja di Kalimantan mengalami tren kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023. Secara umum, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sebagian besar provinsi, dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan jumlah tenaga kerja tertinggi setiap tahunnya, yaitu 2.482.453 orang pada 2021, meningkat menjadi 2.557.523 orang pada 2022, dan mencapai 2.775.245 orang pada 2023. Kalimantan Selatan berada di posisi kedua dengan jumlah tenaga kerja yang fluktuatif, dari 2.109.427 orang pada 2021, sedikit menurun menjadi 2.092.225 orang pada 2022, lalu kembali naik menjadi 2.079.681 orang pada 2023. Kalimantan Timur juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil, dari 1.720.361 orang pada 2021 menjadi 1.746.920 orang pada 2022, dan naik signifikan menjadi 1.847.295 orang pada 2023. Adapun, Kalimantan Tengah mengalami sedikit penurunan dari 1.346.437 orang pada 2021 menjadi 1.344.475 orang pada 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 1.349.875 orang pada 2023. Sementara itu,

Kalimantan Utara memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit dibandingkan provinsi lain, meskipun mengalami peningkatan dari 338.152 orang pada 2021 menjadi 353.984 orang pada 2022, dan naik lagi menjadi 372.270 orang pada 2023.

Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja di Pulau Kalimantan cenderung meningkat setiap tahun, mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, terutama di provinsi dengan jumlah tenaga kerja besar seperti Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Menurut penelitian Jannah & Hasminidiarty (2024) Ketika jumlah tenaga kerja meningkat maka akan menambah tingkat produksi baik barang maupun jasa sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi produk domestik regional bruto.

Selain tenaga kerja, faktor lain yang turut berperan dalam kinerja ekonomi suatu daerah adalah belanja modal. Dimana belanja modal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal dapat membantu untuk pengembangan infrastruktur yang menunjang perekonomian serta mendorong produktivitas penduduk (Kusuma et al., 2024). Belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur, memperbaiki kualitas layanan publik, serta mendorong investasi yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produk domestik regional bruto. Berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan belanja modal di lima provinsi di Pulau Kalimantan.

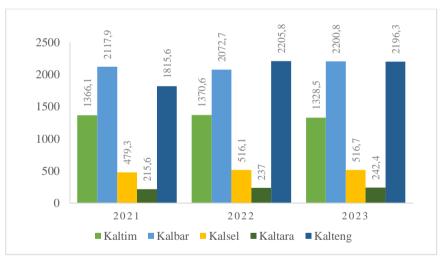


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah)

Gambar 1. 4 Nilai Belanja Modal di Lima Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2021-2023 (miliar)

Berdasarkan gambar 1.4 nilai belanja modal di lima provinsi di Pulau Kalimantan terdapat variasi yang cukup besar, Secara umum, seluruh provinsi mengalami peningkatan belanja modal, mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi daerah. Kalimantan Timur mencatat lonjakan tertinggi, dari 1.514,47 miliar rupiah pada 2021 menjadi 4.128,77 miliar rupiah pada 2023. Lonjakan tersebut menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024) terkait meningkatnya belanja modal tahun 2023 hal tersebut dengan meningkatnya pengeluaran yang didorong oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN di tahun 2023 yang sebagian besar merupakan belanja modal. Selain itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah juga pertumbuhan signifikan, masing-masing mengalami menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Kalimantan Utara, meskipun memiliki belanja modal paling rendah, tetap menunjukkan pertumbuhan dari 399,90 miliar rupiah pada 2021 menjadi 651,64 miliar rupiah pada 2023. Kenaikan belanja modal di seluruh provinsi mencerminkan peran penting investasi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan infrastruktur di Kalimantan, meskipun alokasi anggaran masih bervariasi antarprovinsi.

Selain belanja modal, faktor lain yang turut memengaruhi kinerja ekonomi suatu daerah adalah luas lahan kelapa sawit. Luasnya lahan kelapa sawit yang tersedia berperan penting dalam mendukung sektor perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan yang ada di pulau Kalimantan dan menjadi kontributor utama terhadap aktivitas ekonomi dan peningkatan PDRB. Berikut ini disajikan gambaran mengenai perkembangan luas lahan kelapa sawit di lima Provinsi di Pulau Kalimantan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 5 Luas Lahan Kelapa Sawit di Lima Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2021-2023 (ribu hektar)

Berdasarkan gambar 1.5 luas lahan kelapa sawit di lima Provinsi Pulau Kalimantan tahun 2021-2023. Menunjukan bahwa, Kalimantan Barat memiliki luas lahan kelapa sawit terbesar dibandingkan provinsi lainnya, meskipun mengalami fluktuasi luas lahan. Pada tahun 2021, luas lahan tercatat seluas 2.117,9 ribu hektar,

sedikit menurun menjadi 2.072,7 ribu hektar di 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 2.200,8 ribu hektar pada 2023, menunjukkan adanya ekspansi lahan setelah sedikit penurunan sebelumnya. Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu provinsi dengan luas lahan terbesar, dengan tren yang lebih stabil. Pada 2021, luas lahan mencapai 1.815,6 ribu hektar, kemudian mengalami lonjakan signifikan ke 2.205,8 ribu hektar pada 2022, dan sedikit menurun ke 2.196,3 ribu hektar pada 2023. Kalimantan Timur, meskipun memiliki luas lahan lebih kecil dibanding Kalbar dan Kalteng, menunjukkan tren yang relatif stabil. Tahun 2021 mencatat luas 1.366,1 ribu hektar, meningkat tipis menjadi 1.370,6 ribu hektar pada 2022, tetapi mengalami sedikit penurunan ke 1.328,5 ribu hektar pada 2023. Kalimantan Selatan memiliki luas lahan kelapa sawit yang lebih kecil dibandingkan tiga provinsi sebelumnya, tetapi tetap mengalami pertumbuhan. Pada 2021, luas lahan seluas 479,3 ribu hektar, meningkat menjadi 516,1 ribu hektar pada 2022, dan bertambah lagi menjadi 516,7 ribu hektar pada 2023, menunjukkan pertumbuhan yang relatif lambat namun stabil. Kalimantan Utara, sebagai provinsi dengan luas lahan terkecil, mencatat peningkatan bertahap. Dari 215,6 ribu hektar pada 2021, luasnya bertambah menjadi 237 ribu hektar pada 2022, dan mencapai 242,4 ribu hektar pada 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa, tenaga kerja, belanja modal dan luas lahan kelapa sawit memiliki tren perkembangan yang berbeda di setiap provinsi di Kalimantan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tenaga kerja mengalami peningkatan di sebagian besar provinsi, dengan Kalimantan Barat memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi,

menunjukkan bahwa sektor ekonomi di daerah tersebut mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan dampak terhadap PDRB. Sementara itu, belanja modal memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi. Selain itu, luas lahan kelapa sawit yang terus bertambah di beberapa provinsi, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, mencerminkan ekspansi sektor perkebunan yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan produk domestik regional bruto.

Berdasarkan topik penelitian ini mengenai pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit terhadap PDRB. Dimana, hasil dari penelitian-penelitian terdahulu memberikan kesimpulan yang beragam. Seperti sebuah studi yang dilakukan oleh Natasuanda & Wenagama (2024) menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2024) menyatakan sebaliknya dimana tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB. Adapun penelitian mengenai belanja modal yang dilakukan oleh Primasari (2024) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap PDRB. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Savira (2022) menyatakan sebaliknya dimana belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB. Selain itu, penelitian mengenai luas lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh Feni & Marwan (2023) menyatakan bahwa luas lahan kelapa sawit tidak berpengaruh terhadap PDRB. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan et al. (2022)

menyatakan sebaliknya bahwa luas lahan kelapa sawit berpengaruh positif terhadap PDRB.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih terdapat beberapa inkonsistensi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, penulis menjadikan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu tersebut sebagai celah penelitian (*research gap*). Celah penelitian dalam penelitian ini merupakan *empirical gap* yang muncul karena masih terdapat ketidaksesuaian dari beberapa hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dari variabel-variabel yang telah disebutkan terhadap perkembangan ekonomi, yang tercermin dalam peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penulis juga tertarik dengan adanya variabel luas lahan kelapa sawit yang masih belum banyak diteliti terhadap PDRB di Pulau Kalimantan khususnya tahun 2017-2023. Analisis ini diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang akan mencerminkan fokus penelitian ini. "Pengaruh Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Luas Lahan Kelapa Sawit terhadap PDRB (Studi Kasus pada Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2017-2023)".

# 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit secara parsial terhadap produk domestik regional bruto pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023?
- Bagaimana pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023?
- 3. Bagaimana sensitivitas produk domestik regional bruto terhadap tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit secara parsial terhadap produk domestik regional bruto pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023.
- Mengetahui pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023.
- Mengetahui sensitivitas produk domestik regional bruto terhadap tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023.

# 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

# 1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit terhadap produk domestik regional bruto.

# 2. Kegunaan Praktis

# 1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui mengenai pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit terhadap PDRB pada Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat informasi dan bahan masukan terkait pengaruh tenaga kerja, belanja modal, dan luas lahan kelapa sawit terhadap PDRB pada lima Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2017-2023.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

# 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Provinsi di Pulau Kalimantan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik setiap provinsi di Kalimantan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

# 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan pengajuan judul kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan pada September 2024. Berikut rincian jadwal penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Tahun 2024/2025																							
No		Oktober			November				Desember				Januari				Februari					Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																								
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																								
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																								
4	Seminar Proposal Skripsi																								
5	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi																								
6	Pengumpulan dan pengolahan data																								
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi																								
8	Ujian Skripsi, revisi Skripsi, dan pengesahan Skripsi																								